

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Mentamben: Perlu Insentif untuk Industri Migas

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyatakan untuk lebih menarik investor bidang migas, pemerintah perlu memberi insentif khusus.

"Perlu ada perangsang, misalnya dengan mengubah *split* bagi hasil yang 70:30 supaya mereka lebih tertarik," kata Purnomo sesuai sidang kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Senin.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Megawati tersebut membahas khusus mengenai kebijakan di bidang minyak dan gas.

Purnomo menjelaskan di Indonesia masih terdapat

cadangan gas yang masih belum ada kontraknya dan siap untuk dipasarkan serta dibuat pengembangannya dengan nilai sekitar Rp 130 triliun. "Tadi saya usulkan untuk mengubah *split*, karena sekarang ini tidak ada *lex speciallist* dalam industri migas," katanya.

Artinya, kalau dulu barang-barang impor untuk operasional migas selalu mendapat kekhususan seperti bebas bea masuk, sekarang sudah tidak ada lagi.

Sekarang barang yang masuk untuk kebutuhan migas sama dengan kebutuhan lainnya, sehingga perusahaan minyak termasuk Per-

tamina juga harus membayar pajak seperti perusahaan lainnya. "Jadi, kalau sekarang tidak ada *lex speciallist* maka perlu ditinjau lagi. Dengan adanya pengecualian itu, diharapkan investor bidang migas akan lebih tertarik lagi," tambahnya.

Rencana pemerintah itu masih dalam bahasan di sidang kabinet dan perlu pemantapan lagi. "Sementara kami masih membahas prinsip dasarnya dulu."

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan subsidi migas untuk industri dalam negeri, terutama industri yang mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomi-

an nasional dan menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya untuk pabrik pupuk dalam negeri yang umumnya daya beli gasnya masih rendah.

"Dalam hal seperti ini tentunya harus ada intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi. Subsidinya bisa subsidi harga, bisa subsidi langsung, tapi yang sekarang kita lakukan adalah subsidi harga, sehingga pabrik pupuk ini bisa berkembang dengan baik," katanya.

Saat disinggung bahwa itu tidak akan meng-*encourage* (menganjurkan) investor karena murahnya harga gas, Purnomo menjelaskan detail.

"Yang diterima investor itu tetap sama. Misalnya harga investor X, maka harga yang diterima investor ya X. Yang diperlukan adalah subsidi, misalkan kemampuan suatu industri dalam negeri, misalkan A, ya sekarang subsidi-dinya X-A," katanya.

"Itu yang diberikan pemerintah, dan tadi kita minta komitmen pemerintah, kepada teman-teman di kabinet agar kalau memang ada industri dalam negeri yang memberikan *multiplier effect*, misalkan memberikan lapangan kerja, memberikan kegiatan ekonomi, itu harus diberi subsidi oleh pemerintah," tambah Purnomo. ■ osa

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

Untuk Menarik Calon Investor Bagi Hasil Pertambangan akan Diubah

JAKARTA (Media): Untuk menarik investasi, pemerintah akan mengubah besaran bagi hasil (*split*) sektor pertambangan. Usulan perubahan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan, salah satunya dihapuskannya *lex specialist* (perlakuan khusus) dalam industri migas.

"Namun, itu baru berupa usulan dari Departemen ESDM kepada kabinet," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, usai rapat terbatas tentang kebijakan gas nasional di Istana Negara, kemarin.

Dalam rapat Purnomo memaparkan cadangan gas nasional yang belum terikat kontrak penambangan (*un-commited*), yakni sebesar 90 triliun kaki kubik. "Ini siap (dikelola), silakan saja kalau ada proyek-proyek (gas) yang ingin dikembangkan, kalau ada kebutuhan-kebutuhan lagi tahun 2004 ke depan."

Soal perlu tidaknya pemerintah memberikan insentif, Purnomo mengatakan insentif semacam itu sudah ada. Jika pemerintah memberikan insentif didasarkan pada alasan adanya proyek-proyek di dalam negeri yang tak memenuhi persyaratan teknis dan nilai ekonomi, namun perlu dipertahankan, serta peniadan *lex specialist* terhadap industri migas. "Satu hal yang saya usulkan, untuk mengubah *split*, karena sekarang tak ada lagi *lex specialist* dalam industri migas."

Dulu, jika ada barang masuk berkaitan dengan migas, diberikan *lex specialist* berupa bebas bea masuk dan sebagainya. Sekarang, kemudahan itu tak ada lagi, barang masuk untuk kebutuhan migas dianggap sama dengan barang kebutuhan lainnya. Artinya, kata Purnomo, kalau memang tak ada *lex specialist*, *split* ditinjau lagi. Dulu, ada *lex specialist* saja, *split*-nya sama dengan sekarang. Untuk merangsang investasi, kata dia, mestinya *split* bagi investor lebih baik lagi.

Purnomo mencontohkan Pertamina yang diperlakukan sama dengan perusahaan nonmigas lainnya. Perusahaan migas itu juga harus membayar bea masuk barang kebutuhannya serta pajak lainnya. Dengan begitu, biaya produksi Pertamina bertambah.

Salah satu perangsang itu, perubahan *split* yang memang berada dalam kewenangan kementerian Purnomo. Kalau tadinya untuk gas 70:30, kata Purnomo, mungkin akan ditingkatkan, untuk minyak 85:15 mungkin lebih tinggi lagi bagi investor, supaya mereka tertarik datang.

Tidak menarik
Bagi kontraktor migas, pola bagi hasil migas memang sudah tidak menarik lagi. Setidaknya, kontraktor migas Amerika Serikat, ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) jelas meminta pemerintah mengubah pola bagi hasil blok migas di Aceh, supaya investasi dapat dilanjutkan sehingga kebutuhan gas dalam negeri maupun ekspor dapat terpenuhi.

"Bagi mereka pola bagi hasil dengan pemerintah dianggap tidak menarik untuk investasi. Kalau sekarang bagi hasilnya 65:35 sebaiknya diubah 50:50," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Agusman Effendi usai rapat dengan pendapat Sub Komisi Energi dan Pertambangan Komisi VIII DPR dengan jajaran EMOI yang dipimpin Presiden Direktur EMOI Ron Wilson, kemarin.

Bagi hasil yang dibicarakan itu mengenai pengelolaan blok A, Passe, Aceh antara pihak Indonesia dengan EMOI dan ConocoPhillips sebagai kontraktor bagi hasil migas, bagian untuk pemerintah 65% dan 35% bagian investor.

EMOI meminta perubahan pola bagi hasil karena biaya eksploitasi di ladang tersebut diperkirakan membengkak, setelah ditemukan kandungan sulfur cukup tinggi dalam cadangan gas-

nya. Agusman menambahkan, pihak EMOI sebenarnya setuju mengelola, tetapi karena operator blok ini ConocoPhillips jadi yang harus melaporkan hal ini kepada pemerintah dan DPR adalah pihak Conoco.

Menurut perkiraan ahli, cadangan gas di blok A masih cukup untuk produksi 10 tahun lagi sejak kontrak berakhir 2010. Setidaknya kewajiban suplai gas untuk kebutuhan lokal (*domestic market obligation*) sebesar 25% masih bisa mencukupi untuk kebutuhan industri di negeri Serambi Mekah itu.

Agusman memaparkan Komisi VIII DPR ingin membahas lebih dalam masalah ini. Pasalnya, kelangkaan gas di Aceh akibat menurunnya cadangan gas di ladang Arun, Lhok Seumawe telah menimbulkan gangguan keamanan dan ekonomi, bahkan listrik di lingkungan sekitar pabrik pupuk PT AAF padam.

"Jadi kami bicarakan kepada BP Migas supaya ladang gas itu diambil alih pemerintah. Ditawarkan ulang saja ke perusahaan-perusahaan migas yang berani mengelolanya."

Faktor keamanan memang menjadi kendala masuknya investor untuk mengelola sejumlah blok migas di Aceh, selain insentif pemerintah.

(Has/Wis/E-1)

5

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2004

usulkan, Perubahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

RTA, KOMPAS — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo menyampaikan usul kepada Presiden Megawati untuk meninjau ketentuan bagi hasil bagi eksploitasi minyak dan gas bumi. "Saya usul untuk mengubah bagi hasil sekarang tidak ada lagi *lex specialis* (perlakuan khusus terhadap migas)," ujarnya di Istana Negara sesuai Rapat Kabinet Terbatas (16/2).
"Jelaskan, usul tersebut untuk minat investor berinvestasi di migas. Pada masa lalu, pemerintah

memberikan perlakuan khusus kepada investor minyak dan gas bumi (migas) dengan membebaskan pajak bea masuk terhadap barang yang digunakan untuk operasi migas. "Sekarang, mereka harus bayar pajak, tidak ada lagi kekhurusan. Oleh karena itu, sekarang bagiannya yang harus lebih baik," tutur Purnomo.

Bila saat ini bagi hasil untuk minyak adalah 70 banding 30, yaitu 70 persen hasil untuk negara dan 30 persen untuk investor, perubahan yang diusulkan adalah 60 banding 40. "Perubahan *split* itu juga untuk gas, sekarang 85 banding 15, nanti harus lebih besar

dari itu," ujarnya.

Menurut Purnomo, Presiden belum memberi tanggapan terhadap usul tersebut. "Tadi baru dibahas prinsip dasarnya dulu," katanya.

Atasi Aceh

Komisi VIII DPR meminta kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) untuk mendesak ExxonMobil Oil Indonesia dan ConocoPhillips segera mengembangkan lapangan gas Blok A di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Jika tidak, BP Migas diminta menarik kembali blok tersebut untuk ditawarkan ke perusahaan

lain.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Agusman Effendi mengatakan, investor tersebut sudah mendapatkan hak pengalokasian blok tersebut sejak lama, tetapi tidak dikembangkan dengan alasan keamanan. Padahal, industri di NAD saat ini tengah kekurangan gas alam sehingga pengembangan Blok A dibutuhkan secepatnya. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk di NAD.

"Keamanan di Aceh sudah cukup kondusif. Kalau mereka tidak berani mengembangkan, kasih saja blok itu kepada pemerintah untuk diberikan

kepada perusahaan lain," ujarnya.
Juru bicara ExxonMobil di Indonesia, Deva Rachman, mengatakan ExxonMobil Oil Indonesia Inc (EMCO) memberikan presentasi mengenai prospek gas dan pengaruhnya terhadap penjualan LNG dan pabrik pupuk kepada Komisi VIII DPR. EMOI juga akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatur sumber daya alam dan melindungi reputasi pemerintah sebagai pemasok LNG yang dapat diandalkan. Selain itu juga untuk mengakomodasi permintaan perusahaan pupuk akan gas selama sumber daya alam itu memungkinkan. (ELY/BOY)

6

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2004

Bagian investor migas diusulkan diperbesar

JAKARTA (Bisnis): Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengusulkan dalam Sidang Kabinet agar investor migas diberi insentif penambahan komposisi bagi hasil untuk menggairahkan industri migas nasional.

"Tadi saya sudah mengemukakan di Sidang Kabinet, sudah-mudahan hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menambah gairah investasi di industri migas," ujarnya se usai Sidang Kabinet di Istana Negara kemarin.

Purnomo berbicara dalam

Sidang Kabinet guna merumuskan konsep Kebijakan Gas Nasional baru dalam upaya memantapkan perolehan devisa dari sektor migas. Usulan tersebut nantinya akan dibahas dalam Sidang Kabinet lanjutan dalam waktu dekat, khususnya sesudah kepulangan Presiden Megawati dalam lawatannya ke Iran pekan ini.

Menurut menteri, komposisi bagi hasil gas saat ini 70%:30%, sementara pada industri minyak komposisinya 85%:15%. Komposisi bagi hasil [*split profit sharing*] tersebut diusulkan lebih tinggi lagi

untuk menarik minat investor khususnya investor asing.

Dia menjelaskan sekarang ini tidak ada lagi perlakuan khusus yang bersifat *lex specialis* bagi para pelaku industri migas. Pengertian *lex specialis* di sini misalnya, kalau dulu barang yang masuk dari proyek migas mendapat pembebasan bea masuk, sekarang tidak lagi. Baik industri migas maupun industri lainnya saat ini dikenakan bea masuk yang cukup tinggi.

Khusus untuk industri gas, Purnomo menambakan beberapa target memang masih belum memperoleh komitmen

penuh, atau yang masih belum ada kontraknya, tapi potensial untuk dipasarkan atau dalam arti untuk pengembangan proyek baru senilai Rp130 triliun. Namun sampai hari ini, total *uncommitted* proyek gas nasional mencapai Rp90 triliun yang paling siap untuk dipasarkan.

"Silakan investor datang dan menggarap proyek tersebut, namun dalam pembicaraan awal dengan sejumlah investor tampaknya mereka meminta insentif untuk masuk ke sektor migas. Yang saya usulkan tadi untuk menambah *split profit sharing*,

karena sekarang tidak ada lagi *lex specialis* bagi pelaku bisnis migas."

Purnomo mengatakan usulan itu baru diajukan kepada Presiden dan para menteri di Sidang Kabinet. Maksudnya, beberapa proyek di dalam negeri tidak mempunyai *purchasing power ability*.

Contohnya, beberapa pabrik di dalam negeri, seperti pabrik pupuk yang daya beli gasnya masih rendah. Dalam hal seperti ini memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk pemberian subsidi harga dan subsidi langsung. (dj)

7

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2004

Menteri Energi Usulkan Ubah Pola Bagi Hasil Minyak

"Pemberian bagi hasil lebih besar kepada kontraktor akan merugikan negara."

JAKARTA — Pemerintah akan mengubah pola bagi hasil (*split*) kerja sama dengan kontraktor minyak dan gas bumi untuk merangsang masuknya investor dari dalam dan luar negeri. Bagi hasil pengelolaan minyak dan gas antara pemerintah dan kontraktor dinilai sudah tidak mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro sesudah sidang kabinet terbatas di Istana Negara kemarin mengatakan, pemerintah seharusnya meninjau kembali pola bagi hasil yang diterapkan pada saat ini. Dia mengaku telah mengusulkan perubahan tersebut dalam sidang kabinet.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah memberikan penawaran pola bagi hasil baru kepada investor. *Split* yang

ditawarkan, menjadi 80:20 dan 75:25 untuk minyak serta 60:40 dan 55:45 untuk gas. Sebelumnya, pemerintah menetapkan bagi hasil pengelolaan lapangan-lapangan minyak dan gas dengan investor (kontraktor) dengan pola 85:15 untuk minyak dan 70:30 untuk gas.

Purnomo menjelaskan, pola bagi hasil yang diterapkan pemerintah pada saat ini sudah tidak menarik lagi bagi para investor minyak dan gas bumi. Sejumlah perlakuan khusus kepada investor, berupa pembebasan pajak, kini sudah tidak diberikan. "Sekarang pajak dikenakan, tapi bagi hasilnya masih sama," ujarnya. Menurut dia, pemerintah harus merangsang kegiatan investasi dengan memberikan bagi hasil yang lebih baik.

Dalam rapat tersebut, kata Purnomo, dibahas keluhan dari para investor minyak dan gas bumi di Indonesia. "Akibat penghapusan perlakuan khusus menyebabkan pembengkakan biaya produksi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Energi DPR Agusman Effendi setelah memimpin rapat dengar pendapat dengan kontraktor bagi hasil lapangan gas di Nanggroe Aceh Darussalam, ExxonMobil Oil Indonesia

Inc., mengatakan, kontraktor itu meminta pola bagi hasil diubah dari 65:35 menjadi 50:50. Permintaan itu disampaikan kontraktor asal Amerika itu untuk mengembangkan lapangan gas di Blok A Lhokseumawe. Menurut dia, lapangan gas tersebut dikelola dua perusahaan multinasional, ExxonMobil dan ConocoPhillips.

Mengenai permintaan ExxonMobil Agusman mengatakan, hingga kini DPR belum dapat mengambil keputusan. "Kami akan mempertanyakan status Blok A kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)," ujarnya kemarin, menurut dia, "jika lapangan itu tidak dikerjakan dan kontraktor tidak melakukan eksploitasi, mengapa tidak diberikan kepada perusahaan lain saja?"

Pengamat perminyakan Kurtubi kepada *Koran Tempo* menilai, kebijakan pola bagi hasil yang diterapkan selama 40 tahun sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 telah memberikan keuntungan bagi negara. Menurut dia, dengan pola bagi hasil sebelumnya (85:15 dan 70:30) sudah menguntungkan investor. "Pola lama telah memperhitungkan faktor risiko yang harus ditanggung oleh inves-

tor," kata doktor ekonomi energi dari Colorado School of Mine, Colorado, Amerika, itu kemarin. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sejak awal Orde Baru.

Kurtubi menjelaskan, sebelumnya kegiatan investasi sektor minyak dan gas bumi hanya ditangani satu atap melalui Pertamina. Ketika itu, investor hanya berhubungan dengan perusahaan minyak nasional mewakili pemerintah. "Bahkan pajak kontraktor ditanggung oleh Pertamina," ujarnya.

Namun, sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, kata Kurtubi, pemerintah memberikan persentase bagi hasil lebih besar kepada investor. "Pemberian bagi hasil lebih besar kepada kontraktor akan merugikan negara," ujarnya. Selain itu, mata rantai kegiatan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia menjadi lebih panjang dan cenderung birokratis. "Kalau sebelumnya cukup datang ke Pertamina, sekarang investor harus datang ke pemerintah, BP Migas, Badan Pengatur, kantor pajak, dan sebagainya," kata Kurtubi.

● ali nur yasin/retno sulistyowati-trn

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2004

■ Produksi Minyak Dunia

Pengurangan Tingkat Produksi OPEC Tahap II Dimungkinkan Mei 2004

Jakarta, NERACA

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyatakan upaya pengurangan tingkat produksi minyak mentah bisa dilakukan kembali pada bulan Mei 2004 ini jika pengurangan produksi pada bulan April sebanyak satu juta barel per hari belum sanggup untuk mempertahankan tingkat harga.

"Kalau pengurangan produksi pada bulan April tidak cukup maka untuk bulan Mei bisa dipotong lagi," kata Presiden OPEC yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, kepada wartawan, sebelum sidang kabinet terbatas di Jakarta, kemarin.

Karena itu lanjut dia, OPEC bisa saja mengadakan pertemuan kembali dalam waktu dekat ini jika pengurangan produksi pada bulan Mei 2004 jadi dilakukan. "Untuk membahas keperluan tersebut, OPEC bisa saja mengadakan pertemuan dalam waktu dekat ini," tutur Purnomo.

OPEC sendiri memang telah menyepakati pemotongan jumlah produksi minyak mentah sebesar

1 juta barel per hari (bph) dari 24,5 juta saat ini menjadi 23,5 juta bph di luar produksi Irak terhitung sejak 1 April 2004 mendatang. Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil Konferensi Luar Biasa tingkat Menteri OPEC ke-129 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2004 di Alger, Aljazair.

Keputusan pengurangan produksi itu dimaksudkan untuk mengantisipasi agar harga minyak tetap berada pada rentang mekanisme harga yang telah ditetapkan oleh OPEC yaitu pada kisaran US\$ 22 sampai US\$ 28/barel, khususnya pada kuartal kedua 2004 pada saat permintaan pasar dunia secara musiman akan menurun. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan secara mendalam faktor fundamental dan faktor lainnya yang terkait, mempengaruhi pasokan dan permintaan minyak. Keputusan lainnya adalah pemotongan kuota untuk Indonesia terhitung mulai 1 April 2004 dari 1,270 juta bph menjadi 1,218 juta bph.

Menurut Purnomo, keputusan konferensi OPEC untuk memotong produksi kali ini merupakan keputusan yang sulit karena harus diambil justru pada saat harga se-

dang tinggi dan opini dunia sering melirik OPEC sebagai penyebab utama meningkatnya harga minyak.

Namun keputusan itu diambil setelah mengamati bahwa tingginya harga saat ini bukan disebabkan oleh rendahnya pasokan. "Hal itu disebabkan karena faktor lain seperti rendahnya stok minyak minyak di Amerika Serikat, spekulasi minyak dalam pasar komoditi dan ketegangan regional," kata Purnomo.

Pertimbangan lainnya adalah adanya proyeksi ke depan yang berdasarkan pengalaman OPEC pada masa-masa lalu, pada kuartal ke dua akan terjadi surplus pasokan akibat turunnya permintaan pasar.

"Yang jelas, para Menteri OPEC akan terus memantau perkembangan harga dan sewaktu-waktu sebelum pertemuan berikutnya bulan Maret 2004 dapat saja berkoordinasi melalui jalur informal dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut bila dipandang perlu," katanya.

Sebelumnya, OPEC sendiri telah mempertimbangkan pemotongan produksi minyak mentahnya

jika diketahui permintaan minyak dunia turun drastis. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan harga minyak di kisaran US\$ 22 hingga US\$ 28/barel.

Insentif Khusus

Sementara itu, usai sidang terbatas tersebut Purnomo mengungkapkan, untuk lebih menarik investor bidang migas, pemerintah perlu memberi insentif khusus "Perlu ada perangsang, misalnya dengan mengubah split bagi hasil yang 70:30, supaya mereka lebih tertarik," katanya.

Dijelaskan, Indonesia masih ada cadangan gas yang masih belum ada kontraknya dan siap untuk bisa dipasarkan serta dibuat pengembangannya dengan nilai sekitar Rp, 130 triliun. "Tadi saya usulkan untuk mengubah split karena sekarang ini tidak ada *specialist* dalam industri migas katanya.

Artinya menurut Purnomo, jilidul barang-barang impor untuk operasional migas selalu mendapat kekhususan seperti bebas bea masuk, maka sekarang sudah tidak ada lagi. (22)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2004

OPEC may cut output again if required: Purnomo

the Jakarta Post
arta

The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) may cut output limits again in May if supply curbs in April were not enough to keep oil prices between US\$22 and \$24 a barrel.

By the end of March we will meet again and if (the April cut) is not enough, we will consider (another cut) in May," OPEC president Purnomo

Yusgiantoro, who is also Indonesia's minister of energy and mineral resources, said on Monday.

Indonesia is the only OPEC member in the region.

However, Purnomo added that OPEC would not cut output again in May if the oil price "remains good".

OPEC is scheduled to meet on March 31 in Vienna to discuss its production policy.

Purnomo said any further production cuts from 23.5 million barrels per day (bpd)

would depend on price. The group has a target of keeping the price of a reference basket of seven crudes in the \$22 to \$28 range.

By Friday the price of benchmark Brent North Sea crude oil for April delivery stood at \$30.42 a barrel in London, compared to \$28.60 the week before.

In New York, the reference light sweet crude March contract traded at \$34.35 against \$33 a week earlier.

OPEC ministers decided last

week to reduce official output limits by one million barrels per day, excluding Iraq, from April 1 to avoid any price collapse in the second quarter when demand for oil drops as winter comes to an end in the northern hemisphere.

OPEC, which supplies a third of the world's crude oil, is worried by forecasts of big falls in demand.

The International Energy Agency has predicted that oil demand in the second quarter of this year might

slump by as much as four million bpd, more than double the normal seasonal downturn.

The organization was also ordering the 10 countries within its production quota system to eliminate 1.5 million barrels a day of surplus production now exceeding the official quota of 24.5 million barrels a day.

OPEC already caught markets by surprise in late September when it trimmed overall output by 900,000 barrels per day to 24.5 million barrels, sending prices soaring.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Minyak Dunia 2004

Oleh BACHRAWI SANUSI

SALAH satu mesin penggerak kemajuan suatu industri atau ekonomi suatu negara sangat ditentukan antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan/kebutuhan akan energi, khususnya kebutuhan akan minyak bumi. Negara maju atau industri, terutama yang tergabung dalam OECD akan terhindar dari rasa takut akan lenyapnya pengadaan minyak dunia, seperti halnya yang terjadi pada waktu perang Oktober 1973 di Timur Tengah.

Harga minyak dunia yang sejak puluhan tahun hingga pada September 1973 hanya di bawah US\$2,50/barel, setelah terjadi perang Oktober 1973 harga minyak dunia terus meroket menjadi belasan bahkan puluhan US\$ per barelnya hingga sekarang dan menda tang. Masalahnya negara Arab pengekspor minyak telah melakukan embargo minyaknya kepada Amerika Serikat dan sekutunya.

Oleh karena jumlah kebutuhan atau permintaan minyak dunia terus meningkat tajam, sedangkan pengadaannya semakin dibatasi terutama oleh negara-negara Arab, mau tidak mau hukum permintaan dan penawaran untuk minyak bumi berlaku. Harga minyak dunia terus melejit tinggi.

Walau harus diakui karena sejak tahun 1982 para anggota OPEC terus berpuasa dengan cara mengurangi kuota produksinya, demi harga minyak dunia agar tidak ambruk, tetapi sebaliknya harga minyak tinggi semakin menguntungkan negara-negara Non-OPEC.

Bahkan negara yang masih tetap sebagai negara importir minyak seratus persen seperti Jepang, justru sangat untung. Karena Jepang bukan hanya berhasil menghasilkan mesin-mesin penghasil energi non-minyak bumi, juga berhasil menciptakan berbagai rupa mesin terutama berbagai alat

elektronika dan angkutan yang serba hemat energi.

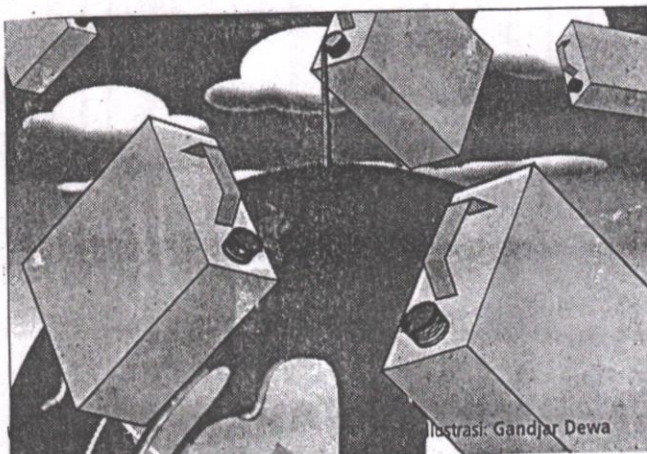
Jepang mampu membuat pilihan dalam penggunaan jenis energi yang sangat menguntungkan. Apakah Jepang dengan semakin banyak memanfaatkan gas bumi, tetap menggunakan batu bara sebagai pelengkap, atau menggunakan pembangkit listrik energi nuklir dan energi alternatif lain.

Begitu juga oleh karena harga minyak dunia semakin tinggi/mahal, maka banyak negara Non-OPEC bangkit, yang semula sebagai negara pengimpor minyak kemudian berubah menjadi negara pengekspor minyak bumi. Misalnya saja Inggris dan Norwegia. Serta banyak negara-negara Non-OPEC, baik yang berada dalam kelompok OECD maupun yang bukan OECD.

Negara Non-OPEC yang semakin berhasil dalam minyak buminya seperti Rusia atau bekas Uni Soviet, Kanada, Australia, Meksiko dan beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika. Nampaknya penawaran/supply minyak dunia tahun 2004 akan jauh lebih aman. Masalahnya orang yang ditakutkan mempermainkan produksi minyak di OPEC ialah Saddam Hussein sudah ditangkap. Ini berarti tidak terlalu sulit terutama bagi kelompok OECD untuk mengatur produksi atau pengadaan minyak bumi yang dibutuhkan.

Permintaan Dunia

Pada 2001 permintaan minyak dunia mencapai jumlah 76,80 juta barel/hari. Jumlah ini terdiri dari permintaan kelompok OECD sebanyak 47,80 juta barel/hari. (OECD Amerika Utara sebanyak 24 juta barel/hari, OECD Eropa sebanyak 15,26 juta barel/hari dan OECD Pacific sebanyak 8,54 juta barel/hari). Dari jumlah permintaan sebanyak tersebut jumlah permintaan terbanyak ialah Amerika Serikat sebanyak



Ilustrasi: Gandjar Dewa

19,65 juta, Empat Negara Eropa sebanyak 8,43 juta, Jepang 5,39 juta, Bekas Soviet 3,64 juta, Cina 4,67 juta, Korea 2,13 juta

barel/hari dan negara - negara lainnya.

Pada 2002, jumlah permintaan minyak dunia 76,99 juta barel/hari, jumlah itu diminta oleh kelompok OECD sebanyak 47,73 juta barel/hari dan Non-OECD sebanyak 29,25 juta barel/hari.

Pada 2003 jumlah permintaan minyak dunia naik menjadi 78,42 juta barel/hari. Jumlah itu diminta oleh kelompok OECD sebanyak 48,49 juta barel/hari dan Non-OECD sebanyak 29,93 juta barel/hari.

Pada 2004 diperkirakan jumlah permintaan minyak dunia akan naik menjadi 79,43 juta barel/hari. Dari jumlah itu diminta oleh kelompok OECD sebanyak 48,68 juta barel/hari

dan Non-OECD sebanyak 30,75 juta barel/hari (MOMR/IEA/OECD, 10 December 2003).

Bagaimana dengan jumlah penawaran (supply) minyak dunianya. Nampaknya setelah Irak berhasil dihancurkan dan Saddam Hussein berhasil ditangkap, maka minimal supply minyak dunia bisa lebih aman. Walau kemungkinan besar OPEC akan terus berpuasa mengurangi kuota/target produksinya, di samping Bush

yang juga pengusaha minyak dunia sangat berkepentingan dengan harga minyak dunia yang tetap tinggi.

Penawaran

Jumlah penawaran minyak dunia tidak bisa lepas dari jumlah produksi minyak dunia. Pada 2001 jumlah penawaran (supply) minyak dunia mencapai jumlah 76,7 juta barel/hari, atau sedikit lebih kecil dari jumlah yang diminta.

Jumlah penawaran minyak sebanyak itu berasal dari minyak kelompok OECD sebanyak 21,9 juta barel/hari (Amerika Utara 14,3 juta, Eropa 6,8 juta dan Pacific 0,9 juta barel/hari), dari Non-OECD sebanyak 22,4 juta barel/hari. Jumlah penawaran minyak dunia Non-OPEC termasuk OECD mencapai jumlah 46,0 juta barel/hari. Sedangkan supply dari OPEC mencapai jumlah 30,7 juta barel/hari.

Pada 2002 jumlah supply minyak dunia sebanyak 76,7 juta barel/hari atau sedikit lebih kecil dengan jumlah yang diminta. Adapun jumlah supply (penawaran) minyak dunia sebanyak itu berasal dari Non-OPEC sebanyak 48 juta barel/hari, termasuk dari OECD sebanyak 22 juta barel/hari. Supply dari OPEC sebanyak 28,6 juta barel/hari.

Pada 2003 jumlah supply/penawaran minyak dunia mencapai jumlah sekitar 79 juta barel/hari. Dari jumlah itu disupply dari Non-OPEC sebanyak 49,0 juta barel/hari, termasuk dari OECD sebanyak 21,8 juta barel/hari. Sisanya dari OPEC.

Pada 2004 jumlah supply minyak dunia penulis perkirakan akan mencapai sekitar 80 juta barel/hari. Dari jumlah supply sebanyak itu berasal dari Non OPEC sebanyak 50,5 juta barel/hari, termasuk dari OECD sebanyak 22 juta barel, sisanya diharapkan dari OPEC

Harga Minyak Mentah

Dari gambaran tersebut penulis memperkirakan bahwa harga minyak dunia pada 2004 tidak akan jauh berbeda dengan harga minyak mentah pada bulan November 2003. Di mana pada bulan tersebut harga per barel minyak Amerika Serikat West Texas Intermediate (WTI) US\$ 31,06; minyak Inggris (Brent) US\$ 28,73; minyak Rusia Urals US\$ 27,63; minyak OPEC basket US\$ 28,48. Terkecuali jika terjadi ketegangan kembali di Timur Tengah. Tetapi karena Saddam Hussein sudah ditangkap, Iran mulai kendor, Libya juga sudah pasrah, maka ketakutan dunia akan lenyapnya sebagian produksi minyak dunia, mungkin tidak terjadi. Karena dunia mulai damai dalam berbagai kepentingan.

*Penulis adalah Lektor Kepala
Fakultas Ekonomi dan
Anggota Pusat Kajian Energi
dan Sumber Daya Mineral
Universitas Trisakti, Jakarta*

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T-4

TAHUN 2004

'ConocoPhilips agar segera kembangkan ladang gas blok A'

JAKARTA (Bisnis): Komisi VIII DPR akan meminta ConocoPhilips untuk segera mengembangkan lapangan gas blok A, Aceh Utara untuk mengatasi kekurangan pasokan gas ke industri pupuk di wilayah itu. Permintaan itu akan disampaikan kepada BP Migas, selaku badan pengawas kegiatan hulu migas.

Wakil Ketua Komisi VIII, Agusman Effendi, menuturkan sampai saat ini ConocoPhilips sebagai operator dari blok tersebut belum mengembangkan lapangan gas tersebut.

"Dari data yang disampaikan, cadangan gas di wilayah tersebut masih tersedia untuk 10 tahun mendatang. Untuk mengembangkan blok A itu diperlukan waktu empat tahun. Jika dapat dimulai tahun ini, maka kelangkaan gas di

Aceh dapat diselesaikan," tuturnya sesuai mengikuti rapat dengar pendapat dengan ExxonMobil Oil Indonesia Inc (EMOI) di DPR kemarin.

Menurut dia, kontrak pengoperasian blok A yang dimiliki ConocoPhillips akan selesai pada 2010. Agusman mengatakan jika KPS (Kontraktor *Production Sharing*) ini tidak mampu mengembangkannya, maka dapat diserahkan kembali ke pemerintah untuk selanjutnya ditender ulang.

"Ini untuk kepentingan negara. Jadi, jika ConocoPhillips tidak mampu, maka pemerintah akan mengambil dan menawarkan ke perusahaan migas lain yang mampu dan berani mengembangkannya. Hal ini nanti akan kami koordinasikan dengan BP Migas," ujarnya.

Agusman menjelaskan sela-

ma ini bagi hasil yang diterapkan di blok A sebesar 65%:35%. Agar perusahaan lain tertarik, katanya, pemerintah perlu memberikan insentif sebesar 50%:50%.

Insentif ini, ujarnya, diperlukan karena dari hasil evaluasi, blok A ternyata mengandung sulfur yang tinggi. Hal ini, katanya, berakibat meningkatnya biaya produksi.

Masih dibicarakan Ketika dikonfirmasi *Bisnis*, *Vice President Development and Relation* ConocoPhillips Indonesia, A.R. Natanegara menuturkan untuk pengembangan masalah blok A masih dalam pembicaraan dengan pemerintah.

"Masalah pengembangan blok A masih dalam pembicaraan dengan pemerintah. Saat ini kami belum dapat menjawab pertanyaan itu. Kami harus berkoordinasi dengan BP

Migas terlebih dahulu untuk memberikan pernyataan," tuturnya.

Dalam rapat koordinasi terbatas 11 Februari 2004, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, melaporkan akibat merosotnya produksi gas di Arun yang dioperasikan EMOI, maka diperlukan tambahan delapan kargo LNG untuk memasok sejumlah pabrik pupuk selama 2004.

"Berdasarkan perkembangan pasar, pada Maret, April dan November 2004 akan sangat sulit mendapatkan tambahan kargo LNG," tuturnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, ujarnya, ada beberapa alternatif yang diambil oleh pemerintah, a.l. pasokan gas ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) turun menjadi 45 juta kaki kubik sampai 2004. (dle)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : T.4

TAHUN 2004

Oman genjot produksi LNG

JAKARTA (Bisnis): Oman menggenjot produksi gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*), menyusul menurunnya hasil minyak negara itu.

Oman, sebagaimana dikutip *www.menewsline.com*, saat ini tengah berupaya meningkatkan produksi LNG menjadi 10 juta ton per tahun mulai 2001.

Produksi LNG negara kesultanan itu saat ini dilaporkan 6,6 juta ton per tahun yang dihasilkan dari dua *train*.

Peningkatan produksi LNG sebanyak 10 juta ton pada 2006 itu, akan dicapai melalui *train* LNG ketiga yang kini sedang dibangun dan *train*-

keempat yang tengah direncanakan. *Train* ketiga dibangun oleh Chiyoda Copr dan Foster Wheeler.

Saat ini, Jepang dan Korea Selatan menjadi pasar utama ekspor LNG Oman, dan penjualan ke pasar Eropa dilakukan melalui spot.

Negara di Jazirah Arab ini berencana menginvestasikan sedikitnya US\$2 miliar hingga 2009 guna memperbesar kapasitas produksi minyak menjadi 800.000 barel per hari pada 2007.

Selama dua tahun terakhir, produksi minyak Oman menurun dari 849.000 pada posisi pertengahan 2001 menjadi 700.000 barel per hari.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 8

TAHUN 2004

Lapangan Migas Blok A Mampu Atasi Kekurangan Gas di Aceh

Jakarta, Investor

Lapangan Migas Blok A di Aceh dinilai mampu mengatasi masalah kekurangan gas yang saat ini dialami oleh sejumlah perusahaan di Aceh. Karena itu, Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menunjuk perusahaan yang akan mengembangkan lapangan tersebut.

"Cadangan yang dimiliki blok itu diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan hingga 10 tahun kedepan. Jadi sebaiknya lapangan itu segera dikembangkan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Agusman Effendi usai Rapat Dengar Pendapat dengan perusahaan migas ExxonMobil Oil Indonesia di Jakarta, Senin (16/2).

Blok A tersebut sesungguhnya saat ini dikembangkan oleh Kontraktor bagi hasil (Kontraktor *Production Sharing/KPS*) Conoco Phillips dan ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) dengan komposisi 50:50. Adapun kontrak pengembangan lapangan ini akan selesai pada tahun 2010. Namun, kenyataannya hingga saat ini kedua operator tersebut sama sekali belum melakukan upaya pengembangan karena alasan keamanan. Padahal saat ini sejumlah perusa-

haan sangat membutuhkan pasokan gas, seperti pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan II, dan pabrik pupuk Asean Aceh Fertilizer (AAF). "Dalam pertemuan tadi terungkap bahwa pihak Exxon sebenarnya sudah menyatakan ke siapannya, tapi semua itu tergantung pihak ConocoPhillips sebagai operatornya," kata Agusman.

Menurut Agusman, sesungguhnya masalah keamanan di Aceh saat ini sudah cukup kondusif, sehingga alasan keamanan tidak lagi menjadi alasan untuk menghambat kegiatan investasi. Ditegaskan Agusman, apabila kedua KPS itu tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka pemerintah harus segera mengambil-alih wilayah tersebut dan menawarkannya kepada pihak lain yang berminat. "Cadangannya sangat besar dan ini sesuai dengan kebutuhan gas kita yang cukup tinggi. Jadi, harus segera diputuskan sekarang mengingat masa pengembangannya membutuhkan waktu empat tahun," katanya.

Namun, lanjut Agusman, pihaknya memahami bahwa pengembangan lapangan tersebut memiliki nilai resiko yang cukup tinggi. Karenanya, DPR kata Agusman

juga mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan insentif khusus bagi pengembangan blok A mengingat kandungan sulfur di daerah tersebut cukup tinggi. Insentif tersebut dalam bentuk perubahan pola bagi hasil yang lebih besar, yakni dari 70:30 menjadi sebaiknya diubah menjadi 65:35, masing-masing bagian untuk pemerintah dan kontraktor.

Sementara itu, Public Affairs Operations Manager ExxonMobil Oil Indonesia Inc, Deva Rachman mengatakan pihaknya sudah memberikan presentasi mengenai pasokan gas dan pengaruhnya terhadap penjualan LNG dan pabrik pupuk. EMOI, kata Deva menghargai kesempatan yang diberikan untuk mengevaluasi permasalahan gas dan fakta yang ada bersama-sama dengan Komisi VIII DPR RI.

"EMOI akan terus bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatur sumber daya alamnya dan melindungi reputasi pemerintah sebagai pemasok LNG yang dapat diandalkan dan terpercaya, dan mengakomodasi permintaan perusahaan pupuk selama sumberdaya alam tersebut memungkinkan," kata Deva. ● eis

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN (FEB) MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2004

ExxonMobil-ConocoPhilips Didesak Lakukan Pengembangan Migas Aceh

JAKARTA (Suara Karya) : DPR mendesak Pihak ExxonMobil dan ConocoPhilips secara aktif melakukan pengembangan wilayah kerja migas Blok A di Aceh. Pasalnya blok itu diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar mencapai 10 tahun sehingga dapat menutupi kekurangan pasok gas di wilayah tersebut.

"Cadangan gas di blok A diperkirakan mencapai 10 tahun sehingga dapat digunakan memenuhi kebutuhan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan Aceh ASEAN Fertilizer (AAF) dan industri lainnya," kata Wakil Ketua Komisi VIII, Agusman Effendi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Exxonmobil di Jakarta, Senin.

Blok A di Aceh pengembangannya diserahkan kepada pihak Exxonmobil dan ConocoPhilips dengan komposisi 50:50. Pengembangan blok itu sampai 2010. Sampai kini mereka belum melakukan dengan alasan keamanan. "DPR meminta investor secepatnya menggarap blok itu, sebab pengembangannya butuh waktu empat tahun. Jadi harus dilakukan sekarang," ungkapnya.

Menurutnya, masalah kekurangan gas di Aceh sudah sangat krusial menimbulkan dampak ekonomi serta keamanan, sehingga, bila operator di Aceh tidak melakukannya, pemerintah sebaiknya mengalihkan penawaran kepada perusahaan lainnya.

"Kalau mereka tak mau melaksanakannya, DPR usulkan agar pemerintah dan BP Migas menawarkan ke pihak lain," katanya.

Agusman menjelaskan, keengganan kontraktor migas itu untuk melakukan pengembangan di blok A dengan alasan keamanan. "Sekarang situasinya sudah lebih kondusif sehingga hal itu sudah tidak bisa dijadikan alasan lagi," tegasnya.

Pihak Exxon dalam hal ini telah menyatakan kesiapannya, tapi semua itu tergantung ConocoPhilips sebagai operatornya. "Kalau mereka tak mau dikembalikan saja ke pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan lain yang tertarik," tegasnya.

Saat ini, dengan alasan membengkaknya biaya eksploitasi akibat sumur yang memiliki kandungan sulfur tinggi, ExxonMobil Indonesia juga meminta

pemerintah mengubah bagi hasil menjadi 50:50 untuk lapangan gas Blok A di Loksumawe, Aceh tersebut. Padahal selama ini pola bagi hasil adalah 65 persen untuk pemerintah dan 35 persen untuk investor.

"Kedua pihak operator di Aceh tersebut meminta adanya perubahan pola bagi hasil dengan alasan untuk menjamin kelanjutan eksplorasinya di lapangan tersebut," katanya.

Menanggapi permintaan itu, DPR sendiri belum bisa mengambil keputusan dan masih harus membicarakannya dengan pemerintah. "Namun, yang pasti DPR akan pertanyakan status Blok A kepada Badan Pelaksana Sektor Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Kalau memang blok itu tak dikerjakan, tak dieksploitasi, kenapa tak diberikan kepada perusahaan lain?" katanya.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro berpendapat, untuk lebih menarik investor bidang minyak dan gas (migas), pemerintah perlu memberi insentif khusus. (CW-1)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2004

■ Pasokan Gas untuk Industri

Exxon dan Conoco Diminta Segera Kembangkan Lapangan Migas Blok A di NAD

Jakarta, NERACA

Dalam usaha mengatasi kekurangan gas bagi kebutuhan pabrik pupuk Asean Aceh Fertilizer (AAF) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kontraktor production sharing (KPS) ExxonMobil dan ConocoPhillips untuk segera mengembangkan lapangan Blok A di kawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam (NAD) itu.

"Nanggroe Aceh Darusallam sudah dalam kondisi kondusif, sehingga tidak ada alasan lagi khawatir dengan situasi keamanan," kata Wakil Ketua Komisi VIII, Agusman Effendi kepada wartawan, di Jakarta kemarin.

Menurut wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar tersebut, DPR akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menyerahkan pengembangan lapangan migas tersebut, jika kedua KPS itu tetap menolak blok yang potensial dengan cadangan gas alamnya itu.

"Saya tegaskan lagi, kondisi keamanan Aceh sudah cukup kondusif sehingga bisa segera dilakukan pengembangan. Kita mendengar, ExxonMobil sudah siap dengan programnya melakukan pengembangan. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari KPS ConocoPhillips. Bagi saya, kalau kalau memang tidak siap, atau kalau tidak berani melakukan pengembangan, serahkan kembali saja blok tersebut kepada pemerintah, untuk kemudian dicari pengganti perusahaan lain yang berminat," tuturnya.

Menurut Agusman, berdasarkan perkiraan, cadangan di Blok tersebut cukup menjanjikan, sehingga sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk di

NAD. Persiapan itu, tambah Agusman, harus dilakukan sekarang mengingat proses pengembangan butuh waktu lebih dari lima tahun.

"Kalau tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi. Kita tidak boleh menunggu sampai habis," katanya.

Ia menegaskan, DPR akan mendukung pemberian insentif bagi pengembangan Blok A tersebut dengan pertimbangan bahwa kandungan sulfur di kawasan tersebut cukup tinggi. Konkretnya, kalau bagi hasil yang umum untuk gas 70:30, maka untuk blok tersebut bisa diberikan porsi lebih besar, yakni 35% untuk KPS dan 65% untuk negara. "Kita akan usulkan ini supaya pengembangannya menjadi lebih menarik," ujarnya.

Blok A dikembangkan secara bersama KPS ExxonMobil dan ConocoPhillips dengan porsi sama besar, 50:50. Kontrak mereka akan berakhir tahun 2010. Salah satu alasan yang menghambat pengembangan blok tersebut adalah masalah keamanan. Menurut catatan yang ada, ExxonMobil sendiri pernah menghentikan operasi ketika situasi keamanan dalam keadaan tidak kondusif sekitar dua tahun silam.

Untuk menambah pasokan gas di Aceh, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, keputusan penambahan pasokan gas untuk kebutuhan pabrik pupuk dan listrik di NAD berada di tangan Departemen Keuangan.

Pasalnya, masalah ini terkait dengan tingginya harga gas di pasar spot. Tapi meski begitu, pemerintah akan tetap berupaya untuk mencari tambahan gas dari

luar negeri untuk menggantikan sementara pasokan LNG dari Arun agar kepentingan masyarakat dan industri dapat terpenuhi.

Purnomo mengakui terjadi kekurangan pasokan untuk kebutuhan gas ke pabrik pupuk di NAD, kendati saat ini sudah dipasok sekitar 73 hingga 75 MMCFD (juta kaki kubik per hari). "Sebagian kebutuhan sudah kita penuhi, tapi memang jumlah yang disalurkan tidak cukup sehingga kita harus mencari kargo dari luar negeri untuk menggantikan pasokan LNG dari Arun. Ini masih diupayakan mengingat waktunya sangat sempit dan harganya mahal kalau dicari di pasar spot, dan apakah tersedia dana dari Depkeu untuk penambahan gas ini. Mencari gas di pasar spot memang pasti mahal," tegas Purnomo.

Menteri ESDM sudah mengirim surat kepada Menperindag Rini Soewandi dan Meneg BUMN Laksamana Sukardi bahwa pemerintah hanya dapat memasok gas untuk Aceh sebesar 73-75 mncfd. Selanjutnya Depperindag dapat mengalokasikan gas tersebut untuk kebutuhan PIM I dan II, serta pabrik pupuk AAF. (31)

16

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Tajuk Rencana

Minyak Tanah Langka (Lagi)

Masalah klasik di sekitar distribusi minyak tanah kembali muncul. Bahan bakar ini kembali langka di beberapa tempat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Menghilangnya minyak tanah dari peredarannya belakangan ini memang menimbulkan kekecewaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga dari kalangan masyarakat bawah. Meski barangnya ada, harganya pun melonjak. Hukum pasar berlaku. Makin langka suatu barang yang dibutuhkan banyak orang, makin tinggi harganya di tempat pedagang.

PT Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina) mengakui terjadinya kelangkaan minyak tanah di Jabodetabek ini. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih dipercaya pemerintah memegang kendali pengalihan dan pendistribusian bahan bakar jenis ini hingga 2005 mendatang menemukan adanya penyelewengan dalam penyaluran minyak tanah sehingga kelangkaan terjadi. Dari hitung-hitungan Pertamina diketahui, konsumsi minyak tanah untuk Jabodetabek berada jauh diatas angka rata-rata yang ditetapkan pemerintah, yaitu 3,75 liter/jiwa/bulan.

Untuk wilayah DKI saja misalnya, konsumsi minyak tanah mencapai 10 liter/jiwa/bulan atau tiga kali lipat konsumsi yang semestinya. Kondisi yang sama juga terjadi untuk kawasan Depok, Tangerang, dan Banten. Di Depok terjadi peningkatan konsumsi menjadi 8,45 liter/jiwa/bulan, Tangerang 6,27 liter/jiwa/bulan, dan Banten 5,1 liter/jiwa/bulan.

"Berdasarkan angka-angka itu Pertamina menyatakan adanya penyelewengan pada distribusi minyak tanah di tingkat agen dan pangkalan. Ini sangat merugikan masyarakat karena meskipun Pertamina menyuplai minyak tanah itu dalam jumlah yang berlebih, masih terjadi kekosongan di beberapa tempat," kata M. Harun pejabat di Hupmas Pertamina.

Penyelewengan di tingkat agen dan pangkalan sehingga minyak tanah menjadi langka seperti yang diakui Pertamina ini, sangat mungkin terjadi. Masih besarnya selisih antara harga minyak tanah subsidi dengan minyak tanah untuk industri bisa jadi merupakan pangkal dari penyelewengan ini. Harga minyak tanah bersubsidi yang ditetapkan pemerintah Rp 700/liter dan merupakan harga Depo Pertamina. Di tingkat pangkalan, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi Rp 890/liter berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri. Sedangkan harga minyak tanah nonsubsidi atau untuk industri Rp 1.800/liter untuk harga eceran, dan Rp 2.200 untuk harga patokan. Artinya, harga minyak tanah untuk industri dan harga subsidi berbanding hampir 1:2.

Namun sangat disayangkan bila itu yang kembali menjadi alasan. Masalah kelangkaan ini bukan satu dua kali terjadi. Pertamina sendiri mengklaim bahwa ia sudah memiliki sistem administrasi untuk mengatur distribusi bahan bakar ini oleh para agen dan pangkalan. Ia juga melaksanakan program pewarnaan minyak tanah bersubsidi (*marker dyes*) di wilayah yang rawan penyelewengan, serta menjalin kerjasama dengan aparat keamanan untuk memantau distribusi minyak tanah melalui koordinasi dengan Tim Terpadu BBM dan Pemerintah Daerah setempat.

Pemerintah seharusnya juga turun tangan mengatasi hal ini karena kelangkaan minyak tanah bisa terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Bagaimanapun, kelangkaan BBM yang menimbulkan *panic buying* di dalam masyarakat dan akhirnya meningkatkan pasokan minyak tanah bersubsidi oleh Pertamina akan meningkatkan dana subsidi BBM yang harus dikucurkan pemerintah. Padahal, dana subsidi BBM itu bisa dialokasikan kembali untuk sektor lain yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak.

Kiranya akan lebih buruk jika kelangkaan ini direayasa pihak-pihak tertentu yang sengaja mencari keuntungan. Subsidi tetap dikucurkan, tetapi yang menikmatinya bukan warga yang berhak menerimanya, dan dalam pada itu pemerintah tak bisa berbuat apa-apa.

17

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

'Kalau Tetap Diblokade, Sumur Minyak Ditutup'

BEKASI — Endang Suhendar, Pengawas Pertamina Daerah Operasional Hulu Jawa Bagian Barat (DOH JBB) berencana akan menutup sumur minyak di Babelan jika aksi blokade jalan terus berlanjut. "Kalau sampai Senin malam aksi blokade masih berlangsung, maka dengan terpaksa kami akan menutup sumur," ujarnya kepada wartawan, kemarin (16/2). Direncanakan, kata dia, Pertamina akan menutup tiga sumur.

Diungkapkan Endang, langkah tersebut tidak dapat dihindari lagi. Pasalnya, daya tampung tangki penampung minyak sangatlah terbatas. "Kami tidak mau ambil resiko bila minyak terus meluber dan tidak tertampung. Padahal, ketinggian maksimal tangki kami enam meter. Kami akan tetap bertahan sepanjang tangki masih mampu menampung minyak, tapi kalau sudah tidak mampu lagi, terpaksa kami akan tutup sumur," ujarnya.

Ketika ditanya soal kelanjutan eksplorasi minyak jika sumur-sumur tersebut ditu-

tup, secara diplomatis Endang menjelaskan karakter sumur minyak itu berbeda-beda. Menurutnya, memang ada sumur yang bertekanan rendah namun ada juga yang bertekanan tinggi.

"Sumur minyak yang bertekanan rendah biasanya kalau ditutup langsung mati. Tapi, sumur minyak yang bertekanan tinggi tidak akan mati meski ditutup," ujarnya. Akan tetapi, sambungnya, jika sumur minyak terus ditutup dan dibuka kemungkinan besar kualitasnya akan memburuk. "Produksinya akan turun atau kadar airnya yang bakal meningkat," tandasnya.

Yang jelas, sambung dia, aksi tersebut sangat merugikan Pertamina. "Pertamina yang harusnya bisa terus memproduksi minyak, menjadi tidak memproduksi lagi," ujarnya. Dalam sehari Pertamina bisa mengangkut 100 rit yang diangkut oleh 14 perusahaan rekanan, dan tiap rit bermuatan 16 ton minyak. "Maka, silakan hitung sendiri kerugiannya," keluhnya.

Sementara itu, mengenai

tuntutan warga agar memperbaiki jalan, Mahdi Abdullah, petugas PT Jasa Sarana Pertamina, menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurutnya, 10 bulan yang lalu jalan-jalan tersebut sudah diperbaiki.

"Kami sudah memperbaiki secara tambal sulam jalan tersebut sampai depan pos polantas (sekitar 13 km). Namun mungkin karena musim hujan, jalanan tersebut jadi gampang rusak," ujarnya. Walau demikian, kata dia, pihaknya akan selalu berusaha memperbaiki jalan. "Tapi, kalau soal dicor atau yang lainnya, itu urusannya pemda," kata dia.

Sedangkan soal kesuburan sawah, pihaknya mengaku tidak bersalah. Selama ini, kata dia, Pertamina tidak pernah membuang limbah ke sawah. "Kami selalu mengangkut limbah ke Balongan dan diolah di sana. Jadi, nggak mungkin kalau ketidaksuburan sawah tersebut karena limbah Pertamina," ujarnya. ■ c03

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

CORPORATE BRIEFS

Santos's proven reserves increases

ADELAIDE, Australia: Santos Ltd., Australia's third-largest oil and gas producer, said proven oil and gas reserves rose 8.3 percent last year after it found customers for its supplies and discovered new fields.

Proven reserves rose to 338 million barrels of oil and gas at the end of 2003, from 312 million barrels a year earlier, Adelaide-based Santos said in a statement to the Australian Stock Exchange. Proven and probable reserves fell 10.4 percent to 636 million barrels after the company reclassified some fields.

Santos is aiming to boost output by between 6 and 8 percent a year on average to 2006, reaching about 80 million barrels in 2008 as new fields start up. It set a target three years ago of finding 50 percent more proven reserves than it produces by the end of 2003. In 2001, it found 19 percent more oil and gas than it produced. — *Bloomberg*

19

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN (FEB) MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (17) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

RP, Thailand to set up regional 'petroleum hub'

The Philippines and Thailand are to begin talks this week in establishing a Southeast Asian "petroleum hub" to boost energy supply in the region, Manila's energy department said on Monday.

A 22-member delegation led by Thai energy minister Prommin Lertsuridej and senior officials of state Petroleum Energy of Thailand are to arrive on Tuesday.

Both sides are to create a "technical working group" to explore areas of cooperation "in the utilization of existing storage facilities,"

the department said.

Discussions will also focus on investment opportunities in the upstream and downstream oil and gas sectors, with the two ministers expected to discuss a joint bid to "establish regional petroleum hub that will bolster energy supply" in Southeast Asia, China, Japan and South Korea.

"The Philippines and Thailand have strongly pushed for the creation of a petroleum hub that will be used as strategic locations for stockpiling and distribution points in Southeast Asia," Perez said. — AP

20

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B 5

TAHUN 2004

Warga Babelan Blokir Truk Minyak, Pertamina Rugi US\$ 192 Ribu per Hari

"Surat sudah disampaikan. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, pemblokiran jalan terus."

BEKASI — Setelah melakukan aksi penanaman pohon pisang di tengah Jalan Raya Kedungjaya yang rusak akibat digilas sekitar 100 truk tangki minyak mentah setiap harinya, kemarin warga Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, memblokir kendaraan truk tangki yang hendak menuju sumur minyak. Mereka menyatakan tidak akan membuka pemblokiran sebelum pihak Bupati Bekasi Saleh Manaf dan Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Barat Bagian Barat (DOH JBB) Cirebon berdialog dengan warga dan bersedia memperbaiki jalan.

Akibat pemblokiran yang berlangsung sejak pukul 07.30 itu bukan saja membuat 35 truk tangki tidak dapat memasuki lokasi sumur minyak, tapi juga Pertamina bakal menderita kerugian sekitar US\$ 192 ribu per hari. Berdasarkan pengamatan *Koran Tempo* di lokasi, ratusan dari sekitar 6.000 keluarga Desa Kedungjaya berjaga-jaga 1 kilo-

meter menjelang sumur minyak. Para sopir truk tangki diperintahkan warga berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan ke sumur minyak.

Sekitar pukul 14.00 WIB Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bekasi AKP Gatot S. dan Kepala Polsek Babelan AKP Wahyudi meminta warga menghentikan pemblokiran dan mengizinkan tiga truk tangki masuk ke sumur Pertamina. Namun, upaya negosiasi itu ditolak warga. "Tidak bisa. Kalau sekarang dipenuhi tiga truk, setelah itu dia minta dua, dan bisa jadi semua," kata Ketua Tim Peduli Masyarakat Kedungjaya Ahmad Syahid Qurtubi.

Pukul 17.00 WIB Syahid mengabarkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersedia berdialog dengan warga. Ketika itu di Desa Kedungjaya sudah tiba Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi Atmajaya. Bupati Bekasi Saleh Manaf tak bisa hadir, tetapi diwakili Wakil Bupati Solihin Sari. "Wakil Bupati sedang dalam perjalanan," kata Syahid.

Menurut Syahid, selebaran itu dikirim juga ke pihak manajemen DOH JBB Cirebon, Bupati Bekasi, Kepala Kepolisian, dan Komandan Daerah Militer Babelan. Khusus untuk Bupati Bekasi, surat disampaikan oleh Kepala Desa Kedungjaya, Misar,

Ketua Badan Perwakilan Desa, Saibi Siswanto Amir, dan tokoh masyarakat, Haji Endang.

Dalam selebaran tersebut, ada tiga tuntutan yang harus dipenuhi Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pertama, segera melakukan perbaikan jalan dengan meningkatkan lebar dan kualitas jalan dengan cara dicor beton dan dilebarkan minimal 2 meter dari kiri dan kanan jalan.

Kedua, segera memberikan dana kebisingan dan keretakan rumah-rumah yang ada di pinggir jalan dengan jarak 100 meter dari tepi jalan. Ketiga, segera memberikan ganti rugi kepada petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen dan puso serta terendam air.

"Surat sudah disampaikan. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, pemblokiran jalan terus," ujar Syahid. Pernyataan Syahid didukung para tokoh masyarakat yang ikut berjaga-jaga, seperti Matroji, Asmat, dan Marhum Ali. "Sebelum ada dialog dan perjanjian hitam di atas putih untuk memperbaiki keadaan, kami terus mendukung pemblokiran," kata Matroji.

Kepala Pengawas Pertamina Tambun DOC JBB, Endang Suhendar, mengemukakan, pihaknya sudah berupaya melakukan negosiasi agar pemblokiran di-

hentikan. "Tapi mereka tidak mau, kecuali setelah dialog dengan pimpinan Pertamina dan Bupati Bekasi," ujar Endang.

Akibat pemblokiran, empat tangki penampung, masing-masing berkapasitas maksimal 2.000 barel per hari, bakal meluber. Menurut Endang, sampai pukul 13.00, dari volume maksimum 8.000 barel minyak yang siap dimasukkan ke dalam truk tangki sudah terisi 7.000 barel di tangki penampung. Bila sampai Senin sore warga tidak membuka pemblokiran, dikhawatirkan tangki penampungan bakal meluber. "Tiga jam lagi bisa luber," kata Endang.

Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat melubernya minyak, pihaknya berencana menghentikan produksi untuk sementara waktu. "Terpaksa produksi dihentikan," kata Endang. Dampaknya, pihaknya tidak dapat mengirim minyak mentah ke Balongan 8.000 barel (1 barel 159 liter) per hari. Bila dikalikan dengan harga minyak mentah US\$ 24 per barel, dalam sehari Pertamina menderita kerugian US\$ 192 ribu. ● ali anwar

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5 - 5

TAHUN 2004

Jalan Berlubang Menewaskan Kepala Dusun

Jalan sepanjang 15 kilometer yang membentang dari Jalan Perjuangan di kota Bekasi sampai Jalan Kedungjaya di Kabupaten Bekasi memang sudah tak layak lagi sebagai jalan raya. Hampir setiap 4 meter, jalan berlubang bagai kubangan kerbau dengan diameter 1-2 meter. Kedalamannya pun bisa mencapai 20 sentimeter.

Penyebabnya, jalan kelas tiga dan empat itu digilas kendaraan truk tangki minyak Pertamina kelas satu bervolume 16 ribu liter minyak mentah, atau setara dengan 20 ton. Setiap harinya, jalan tersebut dilalui 100 truk tangki.

Kondisi jalan rusak parah itu bukan saja dikeluarkan pengendara kendaraan pribadi, angkutan umum, pengendara sepeda motor, dan tukang becak, tapi juga para sopir truk

tangki itu sendiri. "Per dan ban sering rusak," kata Rosyid, sopir truk tangki Pertamina dari PT Ukar Mandiri, kepada *Koran Tempo*. Karenanya, dia mendukung pemblokiran. "Kalau jalan dicor, kan semua diuntungkan," kata Rosyid.

Yang mengenaskan, jalan rusak telah merenggut nyawa Duriat, Kepala Dusun I Desa Kebalen, Babelan. Menurut Babinsa Desa Kebalen, Rahmat Rawi, peristiwa itu terjadi pada Jumat (13/2), pukul 03.00. Ketika itu Duriat naik sepeda motor hendak belanja ke Pasar Babelan. Sesampainya di Jalan Kebalen, Duriat tidak mengantisipasi sehingga motornya terjeblos ke dalam kubangan yang dalam. Dada Duriat melesak terhantam setang motor. "Setelah sampai di rumah, Pak Duriat meninggal," kata Rahmat. ● ali anwar

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8-5

TAHUN 2004

TEMPO/DWI DJOKO SULI



LANGKA. Beberapa pekerja sedang memindahkan tabung gas dari mobil satu ke mobil lain di sebuah toko gas elpiji di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (16/2). Kelangkaan gas elpiji di beberapa daerah terjadi karena ada kerusakan di kawat Balongan, Indramayu. Hingga hari ini beberapa toko harus membatasi penjualan gas elpiji kepada konsumen.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2004

Penyulingan Minyak Asia Nikmati Periode Pemulihan

Singapura, Investor

Saat ini merupakan hari-hari terbaik bagi industri penyulingan minyak Asia. Setelah lebih dari lima tahun diliputi margin tipis dan kelebihan kapasitas yang kronis, kini laba telah menanjak dan banyak penyulingan memompa produk minyak mendekati kapasitas.

Seperti pada banyak komoditas lain, Cina tengah mendorong pertumbuhan permintaan minyak global. Kejayaan ekonomi Cina memicu rekor impor minyak mentah dan bahan bakar pada 2003 ketika negara itu merebut posisi Jepang sebagai konsumen minyak terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat.

Namun pertumbuhan ekonomi solid di seluruh Asia – diperkirakan mencapai 4-8% pada 2004, kecuali Jepang – juga mendorong konsumsi minyak.

Sebagian analis menilai, permintaan dan kapasitas penyulingan Asia lebih seimbang daripada masa kapanpun sejak gelombang ekspansi dan fasilitas baru terbentur krisis finansial 1997, ketika konsumsi anjlok tajam dan memangkas laba industri itu.

“Meski didera SARS dan perang Irak, industri tersebut berkinerja bagus. Tahun ini mungkin yang terbaik dalam satu dekade. Dan sejauh ini margin masih kuat, sebagian besar di antaranya dipicu Cina,” papar Victor Shum di konsultan Purvin & Gertz, Singapura seperti dikutip Reuters, Senin (16/2). “Fakta bahwa margin dapat meningkat meski dihantam SARS menunjukkan bahwa kita mendekati keseimbangan, namun masih ada surplus kapasitas – katakanlah sekitar 200.000 sampai 300.000 barel per hari (bpd).”

Merrill Lynch memaparkan, margin kompleks penyulingan satu barel minyak mentah pada tahap sekunder di Singapura rata-

rata US\$ 4,23 per barel pada 2003, tertinggi sejak 1996. Margin kompleks untuk 2004 sampai 23 Januari adalah US\$ 8,40.

Rebound dari SARS

Permintaan minyak Asia terpukul pada awal 2003 ketika wabah SARS memangkas permintaan perjalanan pariwisata dan domestik di negara-negara yang terinfeksi, terutama Cina, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, dan Singapura.

SARS mendorong permintaan minyak ketika penjualan kendaraan pribadi di Cina melonjak lebih dari 75% pada 2003 karena masyarakat menghindari transportasi umum.

Kemacetan pengiriman batubara ke pembangkit-pembangkit listrik Cina dan rendahnya level air untuk PLTA telah mendorong permintaan bahan bakar disel begitu perusahaan-perusahaan swasta membeli generator untuk menghindari kelangkaan daya. Pembangkit listrik membakar lebih banyak bahan bakar minyak.

Permintaan minyak Jepang, yang tengah menurun, menunjukkan penguatan mengejutkan setelah perusahaan pembangkit listrik terbesarnya, Tokyo Electric Power Co, dipaksa menutup generator-generator nuklir akibat suatu skandal keselamatan dan *demothball thermal plants* yang membakar minyak dan gas.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan permintaan minyak Cina akan meningkat lebih dari 6% pada 2004, atau 340.000 bpd pada 5,83 juta bpd menyusul lonjakan 11% pada 2003.

IEA juga memperkirakan permintaan minyak Asia tumbuh 2,6% pada 22,5 juta bpd dari 21,93 juta bpd pada 2003.

“Marjinnya sangat mence-
ngankan. Cina menyerap banyak
konsentrat kelas menengah pada
kuartal keempat dan sepanjang ta-
hun ini. Permintaan Naphtha juga

bagus,” papar Rifaat El Gohary, direktur pelaksana di Bakri Trading Co (Asia) Pte Ltd, Singapura.

Somjade Chyanuwat, *executive vice president* untuk perdagangan internasional di PTT Thailand, memperkirakan penyulingan-penyulingan Thailand beroperasi pada kapasitas 100% tahun ini dengan margin berkisar pada US\$6-8 per barel, dua kali lipat margin 2003.

Kapasitas yang Hilang

Asia menutup empat fasilitas penyulingan pada 2003: dua di Jepang dengan kapasitas total 190.000 bpd dan masing-masing satu di Filipina dan Australia dengan kapasitas masing-masing 84.000 dan 72.000 bpd.

Shum memaparkan, keseimbangan permintaan/penawaran untuk produk-produk minyak akan terus menyempit ketika permintaan memangsa eksek kapasitas penyulingan.

“Setelah 2005, suplai dapat menyempit. Kami memperkirakan margin saat ini akan bertahan selama beberapa tahun,” tandas Shum.

Namun konsultan yang berbasis di Hawaii, FACTS, tidak terlalu optimis, dengan mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi permintaan minyak pada 2003 – yaitu penumpukan cadangan menjelang perang Irak, krisis nuklir Jepang, dan berakhirnya gangguan suplai dari Timur Tengah – bersifat sementara.

“Prospek periode jangka lebih panjang masih menjadi sumber kecemasan,” tulis FACTS dalam satu riset pada Januari, mengacu pada kapasitas tambahan di Cina, dan terutama di India, yang diperkirakan menambah 620.000 bpd pada 2006.

“Masa depan para penyuling Asia, terutama mereka yang beroperasi di rezim-rezim pasar bebas, mungkin masih berkabut,” tukas FACTS. ● uzi

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B

TAHUN 2004

Mentamben: Perlu Insentif untuk Tarik Investor Migas

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro berpendapat, untuk lebih menarik investor bidang migas, pemerintah perlu memberi insentif khusus. “Perlu ada perangsang, misalnya dengan mengubah *split* bagi hasil yang 70:30, supaya mereka lebih tertarik,” kata Purnomo sesuai sidang kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Senin.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Megawati tersebut membahas khusus mengenai kebijakan di bidang minyak dan gas.

Purnomo menjelaskan bahwa di Indonesia masih ada cadangan gas yang masih belum ada kontraknya dan siap untuk bisa dipasarkan serta dibuat pengembangannya dengan nilai sekitar Rp 130 triliun. “Tadi saya usulkan untuk mengubah *split*, karena sekarang ini tidak ada *lex speciallist* dalam industri migas,” katanya.

Artinya, kalau dulu barang-barang impor untuk operasional migas selalu mendapat kekhususan seperti bebas bea masuki, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang barang yang masuk untuk kebutuhan migas sama dengan kebutuhan lainnya sehingga perusahaan minyak termasuk Pertamina juga harus membayar pajak seperti perusahaan lainnya. “Jadi kalau sekarang tidak ada *lex speciallist* maka perlu ditinjau lagi. Dengan adanya pengecualian itu, diharapkan investor bidang migas akan lebih tertarik lagi,” tambahnya.

Rencana pemerintah itu sendiri masih dalam bahasan di sidang kabinet dan perlu pemantapan lagi. “Sementara kami masih membahas prinsip dasarnya dulu.”

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan subsidi migas untuk industri dalam negeri, terutama industri yang mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian nasional dan menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya untuk pabrik pupuk dalam negeri yang umumnya yang daya beli gasnya masih rendah.

OPEC Bisa Kurangi Produksi Bulan Mei

OPEC bisa saja mengurangi lagi tingkat produksinya pada bulan Mei jika pengurangan produksi pada bulan April sebanyak satu juta barel per hari belum memadai untuk mempertahankan tingkat harga. “Kalau pengurangan produksi pada bulan April tidak cukup maka untuk bulan Mei bisa dipotong lagi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada pers di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Sebelum menghadiri rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri untuk membahas masalah penyediaan gas bumi, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, Purnomo mengatakan, OPEC tetap ingin mempertahankan harga minyak 22 dolar AS hingga 28 dolar AS per barel. ● ant